

**MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH SULAWESI**  
**ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS**

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p><b>Optimalisasi pengembangan sektor/komoditas unggulan wilayah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi komoditas primer dengan nilai tambah rendah</li> </ul>	<p>Pengembangan Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional</p>	<p>Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat</p>	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan</p>	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009</li> <li>• Perluasan areal pertanian di Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra.</li> <li>• Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian</li> <li>• Pembangunan Jalan Lintas Sulawesi</li> <li>• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi.</li> <li>• Rehabilitasi Jaringan Irigasi.</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.</li> <li>• Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa.</li> <li>• Rehabilitasi Jaringan Rawa.</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa.</li> <li>• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah.</li> <li>• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah.</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah</li> <li>• Pembangunan Bendungan Paseloreng di Sulsel.</li> <li>• Rehabilitasi Waduk/Embung Salamekko di Sulsel.</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan air untuk pertanian</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian</li> <li>• Penelitian dan pengembangan tanaman pangan, Lokasi: Sulsel.</li> <li>• Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, Lokasi: Sulut.</li> <li>• Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Sulut, Sulsel</li> <li>• Pengembangan Industri Hilir, Pemasaran serta Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah</li> <li>• Penyediaan pembiayaan yang terjangkau</li> <li>• Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau</li> <li>• Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim</li> </ul>
			Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap dan budidaya	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Zonasi</li> <li>• Revitalisasi Kapal perikanan (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan sistem sarpras pembudidayaan ikan (sesuai kebutuhan)</li> <li>• Pengawasan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya</li> <li>• Pengembangan teknik budidaya ikan</li> <li>• Pengembangan pokdakan</li> <li>• Pengembangan kawasan minapolitan</li> <li>• Pengembangan KUB</li> <li>• Pengembangan sentra produksi (Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo) sistem rantai dingin</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan benih untuk produksi dan pasar (patin, nila, lele, gurame, mas, rumput laut)</li> <li>• Pengelolaan Sumberdaya Ikan (Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulut)</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Angkatan Kerja bidang perikanan dan perkapalan</li> <li>• Penyediaan fasilitas pembekuan ikan</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mencegah overfishing</li> <li>• Peningkatan kelancaran distribusi energi dan BBM</li> <li>• Peningkatan akses kredit usaha perikanan</li> <li>• Pengamanan wilayah laut nasional dari pencurian kapal asing</li> <li>• Pemberdayaan nelayan skala kecil</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pertanahan Provinsi</li> <li>• Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan</li> <li>• Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> </ul>
	Pengembangan klaster industri unggulan wilayah	Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan	Mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut	

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>(SPIPISE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal</li> <li>• Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional</li> <li>• Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi</li> <li>• Pembangunan Jalan Lintas Sulawesi</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makassar</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan</li> <li>• Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi)</li> <li>• Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan makassar)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>Mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju sebagai pusat industri pengolahan berbasis tanaman pangan dan hortikultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR</li> <li>• Peningkatan kapasitas PLTP terpasang</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama pemerintah-swasta</li> <li>• Pengembangan fasilitas pembiayaan dan akses permodalan</li> <li>• Penyediaan infrastruktur energi</li> <li>• Relokasi zona-zona industri ke dalam Kawasan Industri Manado-Bitung.</li> <li>• Mendorong pembangunan fasilitas perkotaan secara kompak di pusat kota dan mengendalikan pembangunan perumahan horizontal.</li> <li>• Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk alokasi ruang setiap fungsi Kawasan Perkotaan Manado-Bitung.</li> <li>• Pengembangan jaringan prasarana dan sarana kawasan perkotaan</li> <li>• Meningkatkan fungsi jaringan prasarana dan sarana untuk menyiapkan Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pintu gerbang Indonesia dari atau menuju Kawasan Asia Pasifik.</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pertanahan Provinsi</li> <li>• Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan</li> <li>• Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</li> <li>• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal</li> <li>• Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Mengembangkan metropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar)</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan dan fasilitas jalan bebas hambatan dan perkotaan (Pembanguna jalan akses bandara Gorontalo)</li> <li>• Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) :</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan</li> <li>• Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi)</li> <li>• Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR</li> <li>• Peningkatan kapasitas PLTP terpasang</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional</b></p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009 (5)</li> <li>• Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.</li> <li>• Pengelolaan Pertanahan Provinsi</li> <li>• Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan</li> <li>• Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</li> <li>• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal</li> <li>• Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional</li> <li>• Pengembangan Industri Hilir, Pemasaran serta Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Pelayanan Karantina pertanian</li> <li>• Pemantapan sistem penyuluhan pertanian</li> <li>• Pengawasan penyaluran kredit</li> <li>• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian</li> <li>• Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi)</li> <li>• Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan Makassar)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR</li> <li>• Peningkatan kapasitas PLTP terpasang</li> <li>• Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan struktur industri (revitalisasi industri pengolahan)</li> <li>• Merelokasi zona-zona industri ke dalam Kawasan Industri Makassar.</li> <li>• Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk alokasi ruang setiap fungsi Kota Mamminasata.</li> <li>• Mendorong pembangunan fasilitas perkotaan secara vertikal dan kompak di pusat kota dan mengendalikan pembangunan perumahan horizontal</li> <li>• Peningkatan kualitas fasilitas investasi</li> </ul>



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses ke pasar ekspor terutama di kawasan nontradisional</li> <li>• Peningkatan fasilitasi perdagangan luar negeri</li> <li>• Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi petani pekebun</li> <li>• Peningkatan akses permodalan</li> <li>• Peningkatan kemampuan pengembangan industri pengolahan komoditi perkebunan</li> <li>• Peningkatan jumlah dan mutu produksi perkebunan</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sentra perkebunan</li> </ul>
	Pengembangan jalur wisata alam dan budaya	Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara	Memperkuat keterkaitan jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken-Wakatobi-Takabonerate- dengan Bali	<b>Prioritas Pulau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Promosi destinasi Pariwisata</li> <li>• Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> <li>• Pengembangan Industri Pariwisata</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pariwisata bahari</li> <li>• peningkatan frekuensi penerbangan antara wilayah Sulawesi dan Bali</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari nasional</li> <li>• Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi ekosistem laut</li> <li>• Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan</li> </ul>
<b>Interkonektivitas domestik intrawilayah</b>	Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sulawesi	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu</li> <li>• Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Sulawesi, sepanjang 3.978,34 km</li> <li>• Penurunan tingkat kecelakaan transportasi</li> <li>• Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> </ul>
			Meningkatkan intensitas perhubungan laut	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda</li> <li>• pembangunan pelabuhan penyeberangan Lokasi: Poso (Sulteng) - Marisa (Gorontalo)</li> <li>• Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Bitung, Makassar serta pelabuhan terpilih lainnya</li> <li>• Ssubsidi perintis dan PSO angkutan laut</li> <li>• Penurunan tingkat kecelakaan transportasi</li> <li>• Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS,AIS) di wilayah Sulawesi; pengerukan alur pelayaran di Bitung, Makassar</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</li> <li>• Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> </ul>
			Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>multimoda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan Peningkatan Sam Ratulangi, Melongguane, Naha, Djalaludin, Mutiara, Bubung, Kasiguncu, Lalos, Pogogul, Syukuran Aminuddin Amir, Seko, Rampi, Soroako, Hasanuddin, Pongtiku, Andi Jemma, Tampa Padang, Tampa Padang, Wolter Monginsidi, Beto Ambari, Sugimanuru</li> <li>• Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo</li> <li>• Penurunan tingkat kecelakaan transportasi</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</li> <li>• Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> <li>• Pengentasan daerah tertinggal</li> </ul>
	Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung	<p><b>Prioritas nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar</li> <li>• Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor di Pelabuhan</li> <li>• Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				makassar)
<b>Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan</b>	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA</li> <li>• Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS</li> <li>• Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah</li> <li>• Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar</li> <li>• Peningkatan APK Pendidikan Tinggi</li> <li>• Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011</li> <li>• Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014</li> <li>• Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul</li> <li>• Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance</li> <li>• Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran</li> <li>• Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten</li> <li>• Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan</li> <li>• Program remediasi kemampuan mengajar guru</li> <li>• Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar</li> <li>• Sertifikasi ISO 9001:2008</li> <li>• Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014</li> <li>• Peningkatan perbandingan guru:murid</li> <li>• Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013</li> <li>• Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi</li> <li>• Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendidikan vokasional</li> <li>• Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional</li> <li>• Pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah pedalaman dan pulau-pulau terdepan/terpencil</li> <li>• Pengembangan lembaga pendidikan berbasis pertanian, perkebunan, dan kelautan</li> </ul>
			Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>• Pemberian imunisasi dasar kepada balita</li> <li>• Penyediaan akses sumber air bersih</li> <li>• Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas</li> <li>• Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010</li> <li>• Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>Meningkatkan efektifitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial</p>	<p>Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB</li> <li>• Penurunan prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk</li> <li>• Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk</li> <li>• Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi &lt; 0,5</li> <li>• Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi &lt;15 persen pada 2014</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau terdepan</li> <li>• Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010</li> <li>• Peningkatan koordinasi pelaksanaan program-program perlindungan sosial</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok</li> </ul> <b>Prioritas Pulau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan swasta (corporate social responsibility)</li> </ul>
<b>Kapasitas energi listrik</b>	Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kapasitas dan integrasi jaringan listrik	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik</li> </ul>
			Diversifikasi sumber energi primer	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan unit pengolahan Biofuel.</li> <li>• Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 0,03 Jt T; Jarak Pagar: 4 Ribu T</li> <li>• Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu</li> </ul> <b>Prioritas Pulau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pusat pengolahan biodiesel dari kelapa sawit</li> <li>• Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri energi terbarukan</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industri energi terbarukan</li> <li>• Peningkatan investasi di bidang energi alternatif terbarukan</li> </ul>
<b>Revitalisasi modal sosial</b>	Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat	Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan	Memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal/tradisional	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan (Bd)</li> <li>• Pelestarian dan Pengembangan Kesenian</li> </ul> <b>Prioritas Pulau</b>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan lembaga keswadayaan masyarakat</li> <li>• Penguatan lembaga adat dan nilai-nilai luhur adat</li> </ul>
			Meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras, antara pemerintah-masyarakat	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Budaya Harmonis</li> <li>• Peningkatan kerjasama dan dialog antar lembaga keswadayaan masyarakat, antara pemerintah dan lembaga keswadayaan masyarakat, dan antar umat beragama</li> <li>• Peningkatan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan</li> </ul>
<b>Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil</b>	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Sulawesi Utara	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> <li>• Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan</li> <li>• Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010</li> <li>• Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan</li> </ul>



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)</li> <li>• Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*)</li> <li>• Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</li> <li>• Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah</li> <li>• Penyediaan pembiayaan yang terjangkau</li> <li>• Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau</li> <li>• Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda</li> <li>• Penurunan tingkat kecelakaan transportasi</li> <li>• Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• Penyediaan Jasa Telekomunikasi</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Deregulasi Kebijakan</li> <li>• Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</li> <li>• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal</li> <li>• Administrasi Badan Hukum</li> <li>• Revitalisasi Pasar Tradisional</li> <li>• Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional</li> <li>• Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</li> <li>• Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan</li> <li>• Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW</li> <li>• Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah</li> <li>• Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms)</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR</li> <li>• Peningkatan kapasitas PLTP terpasang</li> <li>• pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka</li> <li>• Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Listrik Desa (EBT)</li> <li>(ii) PLTS 50 Wp Tersebar</li> <li>(iii) PLTS Terpusat 15 kW</li> <li>(iv) PLTMH (kW)</li> <li>(v) PLT Angin (kW)</li> <li>(vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel</li> <li>(vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi)</li> </ul> </li> <li>• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik</li> <li>• Pengentasan daerah tertinggal</li> </ul> <p><b>Prioritas Pulau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keterkaitan daerah/wilayah tertinggal dan terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Ambon, Ternate dan Sofifi)</li> <li>• Pembangunan jalan di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar</li> <li>• Pengembangan jalur pelayaran perintis</li> <li>• Introduksi teknologi tepat guna</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Reformasi birokrasi dan tata kelola	Penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen</li> <li>• Peningkatan pemetaan terhadap publikasi peraturan perundang-undangan daerah oleh penda dalam sistem informasi yang akurat dan up to date</li> <li>• Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.</li> <li>• Pelaksanaan harmonisasi peraturan perUUan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.</li> <li>• Pelaksanaan dokumentasi hasil evaluasi PDRD dan rekomendasi kebijakan untuk Depdagri</li> <li>• Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik</li> <li>• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen</li> <li>• Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen</li> </ul> <b>Prioritas Pulau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kinerja Kelembagaan Demokrasi</li> <li>• Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>
			Meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi	<b>Prioritas Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan</li> <li>• Optimalisasi penyerapan DAK oleh Daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan APBD tepat waktu</li> <li>• Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Provinsi dan kabupaten/ kota</li> <li>• Peningkatan peran Provinsi melakukan fasilitasi kepada kab/kota agar kab/kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</li> <li>• Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu</li> <li>• Dokumentasi dana transfer</li> </ul>
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan tentang manajemen kepegawaian (revisi Undang-Undang Pokok Kepegawaian Negara- UU No.8 Thn 1974 Jo. UU NO.43 Thn 199 dan peraturan pelaksanaannya).</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang sistem rekrutmen dan pengadaan pegawai</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS</li> <li>• Penyusunan kebijakan Pejabat Eksekutif Senior ( Senior Executive Services)</li> <li>• Penyusunan kebijakan sistem diklat</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang promosi dan mutasi</li> <li>• Penyusunan Undang-undang tentang Remunerasi Pejabat Negara dan peraturan pelaksanaannya</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri yang adil, layak, dan berbasis kinerja;</li> </ul>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan sistem pensiun Pegawai Negeri yang layak;</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan yang memadai bagi pegawai negeri, keluarga dan putra-putrinya;</li> <li>• Penyusunan kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun</li> <li>• Penyelesaian penataan jabatan struktural (Sekretaris Daerah) bagi PNS Pemda</li> </ul>
<b>Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam</b>	Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah	<b>Prioritas Nasional</b> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah
			Meningkatkan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup	<b>Prioritas Nasional</b> • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya
			Memperkuat mitigasi bencana	<b>Prioritas Nasional</b> • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Pengendalian banjir Lokasi: di Gorontalo; Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Bawakaraeng provinsi Sulsel • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana</li> <li>• Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah</li> </ul>